

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bagi Negara yang sedang berkembang seperti halnya dengan Indonesia, pembangunan merupakan salah satu diantara konsep-konsep yang paling mendesak dimasa sekarang ini. Pembangunan adalah konsep normatif, ia menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia (Coralie Bryant dan louise G White; 1987 ; Hal 17). Dimana dalam pembangunan ini mencakup semua aspek kehidupan, dan harus terjadi keselarasan diantara aspek-aspek kehidupan tersebut. Oleh karena itu pembangunan tidak dapat dipersamakan dengan modernisasi, karena ada banyak segi pada tradisi yang meningkatkan potensi manusia dan serta mempertautkan kultur.

Hakekat Pembangunan Nasional adalah :

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. (GBHN 1993).

Pembangunan nasional ini dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia, pelaksanaan pembangunan sering diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan. Program pembangunan tersebut ditujukan untuk mengubah atau meningkatkan kehidupan penduduk, mengubah pengetahuan, sikap atau tingkah laku seseorang, mengubah institusi dimana program tersebut dilaksanakan atau perubahan masyarakat dimana program itu dijalankan. (Abdillah Hanafi dan Guntur Wasesa; 1984; hal 11).

Alasan mengapa negara-negara berkembang lebih menghendaki pelaksanaan suatu program karena adanya beberapa manfaat yang dapat diambil, seperti :

- Sifat kegiatan yang antar lembaga
- Sebagai alat untuk memecahkan masalah
- Menanggulangi keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat
- Menarik perhatian dan dukungan masyarakat
- Mengembangkan motivasi, kegairahan dan inisiatif masyarakat
- Relatif memudahkan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia pun tidak terlepas dari upaya-upaya pembangunan. Guna mewujudkan masyarakat adil makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN yang merupakan arah dan strategi pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan di

Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan penduduk.

Keadaan negara Indonesia yang merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya kurang lebih 75% hidup di pedesaan mendorong perencanaan pembangunan lebih menekankan pada komunitas masyarakat pedesaan sebagai sasaran pembangunan, tapi dengan tidak mengesampingkan sektor dan komunitas lainnya sesuai dengan semboyan pemerataan dan pertumbuhan yang pada akhirnya nanti harus disertai dengan nilai kelestarian pembangunan (Sustained development) (Sutarto, Sedyono et al; 1990; hal 1).

Sebagai agen pembaharu pemerintah berupaya mencari jalan bagaimana cara agar rakyat dapat sadar dengan sendirinya untuk ikut ambil bagian di dalam proses pembangunan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan program-program khusus seperti Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk merangsang dan membantu orang-orang untuk mengembangkan cara-cara hidup masyarakat setempat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat tersebut agar berlangsung dengan baik.

Konsep Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh upaya pemecahan masalah di bidang ketrampilan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan, adalah bagaimana masih kurangnya ketrampilan masyarakat untuk membangun lingkungan sosialnya yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia yang memegang peranan utama dalam

pembangunan nasional dimana masalah sumber daya ini masih diperlukan pemecahan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia seiring dengan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian masyarakat terutama di perkotaan yang melaksanakan program tersebut akan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut

Sejak dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun pada tahun 1969 telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Sasaran bidang ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yaitu kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung kekuatan dan kemampuan pertanian yang canggih. Selama 25 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6,8% per tahun, sedangkan pendapatan perkapita pada tahun 1969 baru mencapai US \$ 70 menjadi US \$ 700 menjelang akhir PJP I. Prestasi tersebut di atas juga diikuti dengan penurunan secara tajam jumlah penduduk miskin, yang selama 25 tahun terakhir Indonesia mampu mengentaskan penduduk miskin sampai 40%.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 1970 sebesar 70 juta orang atau 60% dari seluruh penduduk Indonesia, berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 1976 berjumlah 54,2 juta (40,1% dari seluruh penduduk Indonesia) dan pada tahun 1990 jumlah tersebut berkurang menjadi 27,2 juta (15% dari seluruh penduduk Indonesia). (Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/195-1998/199). Salah satu penjelasan atas keberhasilan ini bahwa

pemerintah Indonesia sejak Orde Baru menganut strategi pembangunan yang beorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan hasil yang telah dicapai ditopang oleh meningkatnya harga minyak bumi tahun 1973/1974 telah memungkinkan pemerintah untuk meletakkan berbagai infra struktur dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Kombinasi antara prestasi pemilihan strategi dan kehadiran berkah minyak yang mengangkat Indonesia dari kelompok Negara berpenghasilan rendah ke tingkat Negara berpendapatan menengah. Dengan melihat hasil-hasil pembangunan yang dicapai pada PJP I telah berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meletakkan landasan yang lebih kuat bagi tahap pembangunan selanjutnya. Naumun ada masalah yang sifatnya mendasar yang belum terselesaikan sampai akhir PELITA V yaitu masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara absolut masih cukup tinggi, penambahan jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang masih belum merata menimbulkan masalah peningkatan kualitas, penyediaan lapangan kerja serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Ternyata pembangunan yang berjalan di Indonesia belum memberikan jawaban yang memuaskan sekalipun secara relatif terjadi penurunan dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi jarak antara si kaya dan si miskin masih cukup tajam. Apabila pada tahun 1970 golongan terbawah menerima 20,3% dari keseluruhan pendapatan masyarakat, maka pada tahun

1976 hanya menerima 19,6% saja, sementara itu bagian yang diterima oleh 10% lapisan terkaya meningkat dari 26,4% menjadi 31%.

Karena pembangunan yang telah berjalan tidak mampu menyentuh setiap strata sosial masyarakat secara merata, maka sejak Repelita III pemerintah telah melakukan revisi strategi pembangunan dengan menekankan pada aspek pemerataan, dengan menggeser prioritas pembangunan dalam Trilogi Pembangunan menjadi: Pemerataan, Pertumbuhan dan stabilitas. Kemauan pemerintah tersebut dituangkan dalam kebijaksanaan 8 jalur pemerataan. Selama ini secara politis pembangunan ekonomi Indonesia berlandaskan pada konsep pemerataan dan keadilan yang berarti pula, berkembang tanpa menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Instrumen yang dipakai cukup banyak, kredit kecil, share saham industri besar kepada golongan ekonomi lemah atau koperasi, pembentukan lembaga baru untuk menangani sektor kecil serta mengalirnya dana cuma-cuma. Tetapi membentuk jutaan manusia miskin, menjadi kelas menengah yang mampu menguasai sebagian aset perekonomian dan sumber daya di tanah air ini memang tidak semudah membangun lonjakan ekonomi bagi segelintir manusia yang sudah memiliki basis investasi dan perekonomian. (Soemitro Djojohadikusumo; Keadilan Ekonomi Masih Harus Diperjuangkan; 1994).

Kemauan pemerintah dalam menjalankan strategi pembangunan yang memperhatikan aspek pemerataan juga akibat dari pertimbangan-pertimbangan pemikiran dan paradigma yang baru, seperti: Pendekatan pada sumber daya

manusia, kebutuhan dasar, ekologi, pemerataan dengan pertumbuhan dan lain-lain. (Tjokroamidjoyo, 1987).

Kebijaksanaan strategi pemerataan sebagaimana telah disebut dimuka pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk program-program/proyek-proyek pembangunan social serta pola implementasinya yang akan dikembangkan sesuai dengan sifat proyeknya. Program/proyek pemerintah masing-masing mempunyai agen yang bertanggung jawab, bahkan untuk program-program yang keberhasilannya sangat tergantung dari berbagai lembaga, maka dibentuklah badan atau panitia koordinasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program atau proyek.

Selain itu program pembangunan akan dapat dipahami secara positif oleh masyarakat apabila penyampaian informasi tentang program tersebut berjalan dengan baik. Proses komunikasi antara pelaksana program dengan penerima program dalam hal ini masyarakat, dalam pelaksanaan program pembangunan mutlak diperlukan. Dengan komunikasi maka maksud, tujuan serta isi program pembangunan dapat diketahui dan dipahami secara benar oleh masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pemberian informasi tentang program yang bersangkutan kepada masyarakat akan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang maksud, tujuan, serta isi program pembangunan. Akhirnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur atau cara untuk melaksanakan program. Bahkan mungkin juga masyarakat menerka atau mengira-ira program tersebut. Keadaan ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap suatu program.

Persepsi atau pemahman yang didasarkan atas apa yang dilihat dan dimengerti seringkali tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diterima atau juga oleh latar belakang masyarakat seperti tingkat pendidikan atau status sosial ekonomi. Oleh karena itu proses komunikasi memegang peranan yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Penyampaian informasi yang memadai dengan cara bahasa yang mudah dipahami akan sangat membantu dalam membentuk persepsi masyarakat. Persepsi selanjutnya akan mempengaruhi sikap masyarakat. Sikap yang merupakan tanggapan moral terhadap suatu fenomena yang ditangkap dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki. Sikap mendukung atau menolak masyarakat terhadap suatu program tergantung bagaimana masyarakat mempersepsikan program tersebut. Persepsi yang negatif akan menghasilkan sikap yang negatif pula terhadap obyek yang ditangkap. Perilaku berupa tindakan nyata yang ditentukan oleh sikap yang dimiliki. Apabila masyarakat bersikap mendukung terhadap suatu program, maka kemungkinan masyarakat akan berperilaku mendukung, baik dukungan material maupun sumbangan pikiran.

Selain itu, dalam pelaksanaan implementasi berbagai program atau proyek pembangunan sosial pada umumnya mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Namun dapat dikatakan belum banyak yang sistemnya memadai dan banyak diantaranya yang dikatakan lemah. (Tjokroamidjojo, 1987: 55). Hambatan dan permasalahan di tingkat lokal pada umumnya diketahui setelah terlambat justru karena kurang memperhatikan masalah dari bawah. Demikian

pula kelemahan-kelemahan yang lain perlu ditanggulangi agar pelayanan sosial benar-benar sampai pada target sasaran.

Salah satu usaha pemerataan yang cukup mendasar di bidang pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok antara lain pemenuhan kebutuhan akan kesempatan kerja dan ketrampilan individu masyarakat, seperti yang telah dituangkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian kesempatan kerja dan ketrampilan individu seseorang merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus dicurahkan pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan, kesejahteraan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada dasarnya bukanlah masalah utama bila struktur dan daya dukung ekonomi cukup kuat menyerap seluruh tenaga kerja dan memeberikan sumber penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan suatu tindakan, usaha yang dilakukan antara lain dengan mengadakan pembinaan usaha sektor informal. Definisi sektor informal adalah sebagai berikut: Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan, dan faktor ketrampilan (Sethuraman,

1981). Disamping definisi sektor informal yang dikemukakan oleh Sethurman, perlu ditambahkan definisi kedua (khususnya untuk negara Indonesia) yang dikemukakan oleh Hidayat, mencakup tiga butir :

1. Sektor informal adalah sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah.
2. Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak punya access) bantuan meskipun pemerintah telah menyediakannya.
3. Sektor yang telah menerima bantuan tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat sektor itu berdikari (tetap gurem).

Peranan sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dirasakan memberi andil yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Keadaan ini khususnya disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah angka pengangguran dan semakin terbatasnya kesempatan kerja yang dapat diciptakan di sektor informal. Dengan pembinaan di sektor informal diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan (Petunjuk Pelaksanaan P2KP, 2007: 1). Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capital social) kehidupan masyarakat. Dengan demikian, BKM selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarkan aspirasi kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitaraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaatan (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM (Petunjuk Pelaksanaan P2KP, 2007:

1). Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk memperluas jangkauan wilayah dan keberlanjutan pelaksanaan P2KP, dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan.

Keberlanjutan pelaksanaan P2KP ini sangat penting mengingat kontribusi BLM P2KP saat ini baru membiayai sekitar 10-15% dari kebutuhan program yang disusun masyarakat (PJM Pronangkis), sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. Sedangkan perluasan wilayah sasaran dilakukan dalam rangka upaya mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi 8,2% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2009. Mulai tahun 2007 P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun ini PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) (penjelasan singkat mengenai PNPM Mandiri, IPM dan MDGs dapat dilihat pada lampiran 1).

Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat "Berdaya" dan "Mandiri", yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat;

- c. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan;
- d. Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.

Sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP adalah sebagai berikut:

- a. Terbagunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
- b. Tersedianya PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
- c. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.

Sebagai program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai, maka prinsip dasar adalah "Pemberdayaan Manusia Seutuhnya" untuk menumbuhkan kepedulian, kerelawanan dan perilaku yang berpihak kepada masyarakat miskin dengan dilandasi keikhlasan memberikan prioritas kepada warga yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya. Untuk itu nilai dan prinsip yang melandasi pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP adalah

- a. Nilai-nilai luhur kemanusiaan (perilaku/moral), yakni jujur, ikhlas, peduli, serta dapat dipercaya;
- b. Nilai-nilai kemasyarakatan (modal sosial), yakni kebersamaan, solidaritas sosial, gotong royong, kekeluargaan serta kesatuan dalam keragaman;
- c. Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, dll).

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai PNPM Mandiri P2KP, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Melambungkan pola pembangunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin dan berkedilan, melalui:
 - Pembangunan lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan
 - Perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis berbasis pada peningkatan IPM-MDGs.
- b. Menyediakan stimulan BLM secara transparan untuk mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui:
 - Pembangunan sarana/prasarana lingkungan
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
 - Pengembangan ekonomi lokal dengan prasyarat tertentu

c. Memperkuat keberlanjutan program, dengan:

- Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis, partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya
- Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska program.
- Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan

Lokasi sasaran PNPM Mandiri P2KP untuk tahun anggaran 2007 meliputi 33 propinsi, 249 kota/kabupaten, 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan/desa, yang terbagi atas 2 kategori, sbb:

- a. Lokasi lama (sudah/sedang melaksanakan P2KP) kecamatan-kecamatan yang telah menjadi lokasi sasaran P2KP sebelumnya dan sebagian besar BKM diwilayah kecamatan tersebut mempunyai kinerja baik, sebanyak 4.400 kelurahan
- b. Lokasi baru (belum ada P2KP)

Kecamatan-kecamatan perkotaan yang belum melaksanakan P2KP sebanyak 2.873 kelurahan.

Pola pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri P2KP tahun 2007 secara umum mengacu kepada pedoman umum P2KP-3 dan pedoman-pedoman teknis yang telah ada dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang mengarah pada peningkatan IPM-MDGs seperti:

1. Pedoman Teknis Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal;
2. Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan RKM;
3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (RK);
4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (PS);
5. Pedoman Teknis Pembentukan Bdan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
6. Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis;
7. Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
8. Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan Dana BLM dan,
9. Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan serta SOP-SOP lainnya

Penerima manfaat PNPM Mandiri P2KP adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh seluruh masyarakat, pemerintah kelurahan/desa stakeholder setempat, melalui proses pemetaan swadaya (community self survey) berbasis IPM-MDGs. Salah satu alat untuk menunjang PNPM Mandiri P2KP adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), BLM merupakan dana Stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai Tridaya agar mandiri dalam menaggulangi persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM serta mempercepat pencapaianMDGs di wilayahnya. Alokasi BLM di lokasi kelurahan lama bervariasi antara Rp 150 juta hingga Rp 350 juta, sesuai jumlah penduduk di kelurahan tersebut seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Distribusi Alokasi Dana BLM di Kelurahan Lama

| Kategori | Kategori kelurahan | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | Kecil | Sedang | Besar |
| Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Yang Menjadi Lokasi PNPMMandiri P2KP | <3.000 Jiwa | 3.000 s/d 10.000 jiwa | >10.000 jiwa |
| Plafond Jumlah Alokasi Dana BLM | Rp 150 juta | Rp 200 juta | Rp 350 juta |
| Tahapan Pencairan dana BLM | Tahap 1= 40%, Tahap 2= 60% | | |

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PNPMMandiri P2KP 2007 hal 4

Sedangkan alokasi BLM untuk lokasi kelurahan baru atau BLM Tridaya adalah bervariasi antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta, sesuai jumlah penduduk di kelurahan tersebut dengan rincian seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Distribusi Alokasi Dana BLM di Kelurahan Baru

| Kategori | Kategori kelurahan | | |
|---|---|-----------------------|--------------|
| | Kecil | Sedang | Besar |
| Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Yang Menjadi Lokasi PNPMMandiri P2KP | <3.000 Jiwa | 3.000 s/d 10.000 jiwa | >10.000 jiwa |
| Plafond Jumlah Alokasi Dana BLM | Rp 200 juta | Rp 300 juta | Rp 500 juta |
| Tahapan Pencairan dana BLM | Tahap 1= 20%, Tahap 2= 50% dan Tahap 3= 30% | | |

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PNPMMandiri P2KP 2007 hal 5

Dana BLM Pronangkis untuk lokasi lama digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang ada dalam PJM Pronangkis, yang dibuat berdasarkan pemetaan swadaya berbasis kinerja peningkatan IPM-MDGs. Pemanfaatan dana BLM untuk kegiatan pengembangan ekonomi yang bersifat pinjaman

bergulir, hanya diperkenankan apabila telah memenuhi dua persyaratan pokok sebagai berikut;

- a. Masih terdapat kebutuhan program dana bergulir dalam PJM Pronangkis berbasis kinerja peningkatan IPM-MDGs;
- b. Kinerja pengelolaan dana bergulir sebelumnya menunjukkan hasil yang baik, dengan indikator minimal tingkat pengembalian (repayment rate) perguliran dana adalah 80%.

Pencairan dana BLM ke BKM dilakukan dalam 2 tahap, yakni Tahap I sebesar 40% dan tahap II sebesar 60%, melalui rekening Bank yang dibuat oleh BKM, dengan ketentuan:

Tabel 1. 3
Mekanisme Pencairan Dana BLM dan Pra-Syarat Pencairan
untuk Lokasi Lama:

| Tahap Penyaluran | Pra-syarat |
|------------------|---|
| Tahap 1: 40% | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pengelolaan dana dan hasil kegiatan sebelumnya memenuhi persyaratan pedoman P2KP; • BKM telah mere-orientasi PJM Pronangkis yang disusun berbasis kinerja pencapaian target IPM-MDGs, yang telah diverifikasi KMW; • SPPB ditanda tangani |
| Tahap 2: 60% | <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dan sertifikasi KMW terhadap pembukuan BKM dengan hasil baik; • Verifikasi KMW tentang kinerja transparansi, akuntabilitas BKM menunjukkan hasil memuaskan; • 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan; • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh fasilitator dan KMW; • Proposal/usulan BKM untuk tahap 2 telah disetujui KMW. |

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP 2007 hal 5

Ketentuan pemanfaatan dana BLM untuk lokasi baru, pencairan Dana BLM ke BKM dilakukan secara bertahap, yakni tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 50% dan tahap III sebesar 30% dari alokasi dana BLM setiap kelurahan/desa sasaran, melalui rekening Bank yang dibuat oleh BKM, dengan syarat pencairan sbb:

Tabel 1. 4
Mekanisme Pencairan Dana BLM dan Pra-Syarat Pencairan untuk Lokasi Baru

| Tahap Penyaluran | Pra-syarat |
|------------------|---|
| Tahap 1 : 20% | <ul style="list-style-type: none"> • BKM terbentuk sesuai ketentuan P2KP • PJM Pronangkis yang disusun berbasis kinerja pencapaian target IPM-MDGs, yang diverifikasi KMW; • SPPB ditanda tangani |
| Tahap 2 : 50% | <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi KMW tentang kinerja, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan hasil memuaskan • 95% dana tahap I telah dimanfaatkan • Penerima manfaat langsung masuk dalam daftar KK miskin (PS-2) • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM tahap 2 telah diverifikasi oleh fasilitator dan KMW • Proposal/usulan BKM untuk tahap 2 telah disetujui KMW |
| Tahap 3 : 30% | <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dan sertifikasi KMW terhadap pembukuan BKM dengan hasil baik • Verifikasi KMW terhadap kinerja transparansi dan akuntabilitas dana serta pelaksanaan kegiatan BKM/masy • Penerima manfaat langsung masuk dalam daftar KK miskin (PS-2) • 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan • Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan telah diverifikasi fasilitator • Proposal kegiatan BKM untuk tahap 3 telah disetujui KMW |

Sumber: *Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP 2007 hal 6*

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikoordinasikan ke dalam sistem lembaga yang terpadu, dan diperlukan suatu saluran komunikasi yang tepat sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang diberikan dalam proses penyuluhan dan bimbingan usaha mandiri. Program PNPM Mandiri P2KP merupakan salah satu program peningkatan ketrampilan dalam upaya mempertinggi produktivitas, kualitas kerja dan mutu produk dari usaha mandiri.

Dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri P2KP proses alur kegiatan dilakukan oleh lembaga koordinasi program PNPM Mandiri P2KP di Tingkat Dati II seperti dalam rangka pemilihan lokasi desa/kelurahan, penyuluhan, dan seleksi calon peserta, bimbingan teknis dan pemantauan kegiatan.

Salah satu daerah yang dijadikan sebagai lokasi program PNPM Mandiri P2KP yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Kecamatan Pati Kelurahan Pati Kidul, yang secara fisik hasil yang dilaksanakan nampak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 5
JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS P2KP
 Kelurahan Pati Kidul

| No | Nama Kegiatan Pertemuan | Tanggal | Jml Peserta | L | P |
|----|---|--------------|-------------|----|----|
| 1 | Sosialisasi Awal | 28 Mei 2007 | 73 | 26 | 47 |
| 2 | Rembug Kesiapan Masyarakat(RKM) | 14 Juni 2007 | 69 | 24 | 45 |
| 3 | Pertemuan Pra Pelatihan (Pembentukan Panitia Pelatihan) | 25 Agus 2007 | 37 | 29 | 8 |
| 4 | Pelatihan Dasar Relawan | 6-8 Sep 2007 | 25 | 18 | 7 |
| 5 | Coaching FGD RK | 9 Sep 2007 | 25 | 18 | 7 |
| 6 | Lokakarya Refleksi Kemiskinan (RK) | 24 Sep 2007 | 67 | 43 | 17 |
| 7 | Pembentukan Tim Pemetaan Swadaya (PS) | 5 Okt 2007 | 78 | 54 | 24 |
| 8 | Coaching PS | 10-12 Okt 07 | 25 | 18 | 7 |
| 9 | Lokakarya PS | 26 Okt 2007 | | | |
| 10 | Pembentukan Tim Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) | 30 Okt 2007 | 89 | 58 | 31 |
| 11 | Coaching BKM | 1-2 Nov 2007 | 25 | 18 | 7 |
| 12 | Perumusan Tata Tertib Pemilihan BKM | 4 Nov 2007 | 21 | 17 | 4 |
| 13 | Perumusan AD BKM | 6 Nov 2007 | 24 | 16 | 8 |
| 14 | Pemilihan BKM | 16 Nov 2007 | 26 | 18 | 8 |
| 15 | Pengukuhan & penetapan koordinator Relawan | 19 Nov 2007 | 55 | 30 | 25 |

Sumber: Laporan Data Pelaksanaan P2KP Kelurahan Pati Kidul

Dari data diatas telah dilihat bahwa jadwal pelaksanaan program P2KP di kelurahan Pati Kidul telah terjadwal sedemikian rupa sehingga program P2KP nantinya dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal dan aturannya.

Implementasi pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP bukanlah kegiatan yang sederhana, karena melibatkan banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain: komunikasi, sumber daya manusia, pendidikan,

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi, pengawasan, struktur birokrasi, partisipasi, sikap masyarakat dan lain-lain.

Keadaan lain yang menghambat pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP adalah mengenai proses sosialisasi program terhadap masyarakat penerima program. Dikarenakan latar belakang pendidikan masyarakat yang berbeda, sehingga masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah perlu bimbingan khusus dalam sosialisasi program agar dapat dimengerti tentang apa yang disampaikan pemandu kepada masyarakat tersebut. Komunikasi antara pihak pemberi program dan penerima program merupakan tindakan yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi program. Penyampaian informasi yang tepat tentang suatu program akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program. Diperlukan berbagai unsur pendukung dalam melaksanakan komunikasi, seperti media yang tepat, cara penyampaian, kemampuan aparat atau petugas, dan berbagai unsur lainnya. Komunikasi merupakan proses pengoperan/penyampaian ide, pikiran, perasaan, informasi ataupun pengalaman pada pihak lain (Astrid, 1974 : 40). Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi, khususnya dalam implementasi program-program organisasi yang ditetapkan. Dengan komunikasi maka program akan dapat dimengerti, dipahami tentang proses, prosedur maupun ketentuan-ketentuan lain serta maksud dan tujuan program yang ditetapkan. Kebutuhan komunikasi yang efektif dan efisien akan lebih terasa bila suatu program bersifat penunjukkan dari atas. Tanpa komunikasi yang efektif, akan dapat menimbulkan penyimpangan informasi

sehingga maksud atau isi informasi akan dipahami secara keliru oleh penerima informasi.

Keadaan lain yang menghambat adalah kondisi sosial ekonomi dari masyarakat. Kondisi sosial ekonomi berkaitan dengan sikap masyarakat yang masih menganggap bahwa instansi pemerintah hanya sebagai ”pemberi bantuan” belum dianggap sebagai pendorong (enabler), sehingga menganggap bahwa stimulan yang diberikan itu merupakan bantuan masyarakat, jadi tidak perlu dikembangkan lebih lanjut. Maka apa yang menjadi sasaran tujuan Program PNPM Mandiri P2KP berjalan lambat. Selain itu masih adanya orientasi masyarakat untuk bekerja di sektor informalpun masih cukup tinggi sehingga mengurangi minat untuk berusaha sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, Adanya pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat PNPM Mandiri P2KP perlu diketahui bagaimana komunikasi dan sikap masyarakat sebagai penerima program agar program tersebut dapat di implementasikan dengan baik.

Dengan memperhatikan kondisi yang ada kaitannya dengan implementasi program PNPM Mandiri P2KP di Kabupaten Pati seperti yang terpapar dalam latar belakang masalah, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi antara pelaksana program dan penerima program berpengaruh terhadap implementasi

program PNPM Mandiri P2KP. Disamping komunikasi antara pelaksana program dan penerima program, maka sikap masyarakat juga berpengaruh terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP. Selanjutnya komunikasi dan sikap secara bersama-sama dapat mempengaruhi implementasi program PNPM Mandiri P2KP.

Dari uraian di muka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian tentang pengaruh komunikasi dan sikap masyarakat terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP di Kelurahan Pati kidul Kabupaten pati sebagai berikut: "Bagaimana korelasi antara komunikasi dan sikap masyarakat dengan implementasi program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat PNPM Mandiri P2KP di Kabupaten Pati, Kelurahan Pati Kidul?"

C. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam suatu penelitian, kerangka dasar teori merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Dengan kerangka teori akan mempunyai landasan yang jelas untuk menganalisa permasalahan yang ada sehingga akan jelas mengenai arah, tujuan serta konsep yang melandasi suatu penelitian

1. Pengertian Teori

Menurut *Kerlinger* teori adalah serangkaian konsep, definisi dan preposisi yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena, dimana gambaran tersebut dijabarkan dengan menghubungkan variabel yang satu dengan variabel

lainnya untuk menjelaskan fenomena tersebut (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 19084: 25).

Selain itu Bintoro dan Mustopodjojo, memberikan pengertian teori adalah:

(Bintoro dan Mustopodjojo, 1984: 12)

”Ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara gejala atau diantara perubahan dalam bidang tertentu, sehingga dapat dipergunakan sebagai kerangka berpikir (frame of thingking) dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul di dalam bidang tertentu”.

Dari dua pendapat mengenai definisi teori seperti tersebut di atas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan preposisi yang mempunyai hubungan kausal yang logis tentang suatu fenomena, sehingga dapat dipakai sebagai kerangka berpikir dalam memecahkan suatu masalah.

2. Teori-Teori yang mendukung

Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai variabel dasar. Menurut George C. Edward III dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi.

Secara lengkap *Edward* menyatakan sebagai berikut:

...Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini dengan mempertimbangkan empat faktor atau variabel dasar dalam pelaksanaan (implementasi) kebijakan pemerintah: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi (Budi Winarno, 1989: 155).

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka penulis menurunkan variabel bebas dari faktor komunikasi dan faktor disposisi atau sikap.

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan, ini sesuai dengan pendapat Edward bahwa:

”Persyaratan utama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, baru kemudian keputusan-keputusan kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Tentu saja, komunikasi mengandung persyaratan-persyaratan seperti: transmisi yang mudah, klaritas (kejelasan) informasi serta konsistensi” (Budi Winarno, 1989: 156-159).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi mempunyai hubungan yang positif dengan implementasi suatu kebijakan yang diputuskan.

Sikap (attitude) merupakan unsur yang juga penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, ini sesuai dengan pendapat Edward yang menyatakan bahwa:

”Jika pelaksana memperhatikan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan, mereka akan melaksanakan kebijakan itu seperti apa yang dimaksudkan oleh pembuat keputusan. Tetapi ketika sikap atau persepsi pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan kebijakan mengalami lebih banyak kesulitan (Edward, 1980: 89).

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan sangat tergantung dari sikap para pelaksana kebijakan.

Pendapat lain tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dikemukakan oleh Sondang P Siagian yaitu sebagai berikut:

..... tiga segi yang ada kaitannya dengan implementasi yaitu:

1. Struktur dan proses organisasi;
 2. Sistem-sistem formal dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi;
 3. Peranan manusia dalam implementasi kebijakan.
- (Siagian, 1985: 226).

Berdasarkan pendapat di atas penulis memilih sistem-sistem formal dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi (komunikasi antara instruktur dengan masyarakat) dan peranan manusia dalam implementasi kebijakan dan strategi (sikap masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pelaksana program PNPM Mandiri P2KP) sebagai variabel bebas.

Akhirnya pendapat terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh Randall B.Ripley dan Grace A. Franklin. Mereka menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu:

Proses pelaksanaan kebijakan melibatkan sejumlah faktor yang ahli untuk mewujudkan berbagai tujuan dan harapan yang beragam dan kompetitif, bekerja dalam lingkungan yang tumbuh pesat dan kompleks untuk melaksanakan program-program pemerintah, yang membutuhkan dukungan dari sejumlah lapisan dan unit pemerintah, dilengkapi dengan faktor-faktor kekuatan dan kontrol (Ripley, 1982: 9).

Berdasarkan pendapat di atas, penulis memilih aktor yang ahli (komunikasi antara instruktur dengan masyarakat penerima program PNPM Mandiri P2KP) dan dukungan sejumlah unit atau lapisan dari pemerintah, dikarenakan masyarakat sebagai variabel bebas (sikap masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pelaksana program PNPM Mandiri P2KP).

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi implementasi program PNPM Mandiri P2KP di Kabupaten Pati serta keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada diri peneliti, maka peneliti hanya mengambil variabel komunikasi dan sikap masyarakat

sebagai obyek sekaligus pelaksana program paling operasional, sebagai variabel bebas/berpengaruh dalam penelitian ini.

Adapun pengambilan variabel ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Variabel komunikasi (antara instruktur dengan masyarakat penerima program PNPM Mandiri P2KP) merupakan variabel berpengaruh/variabel bebas sebagai variabel X_1
2. Variabel sikap (masyarakat sebagai obyek sekaligus pelaksana program PNPM Mandiri P2KP) merupakan variabel berpengaruh/variabel bebas sebagai variabel X_2 .

Selanjutnya pengaruh dari variabel komunikasi dan variabel sikap terhadap variabel implementasi program PNPM Mandiri P2KP akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Program PNPM Mandiri P2KP.

Komunikasi merupakan proses transfer informasi dari komunikator kepada komunikan dapat mengerti dan memahami informasi yang diberikan. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab melalui komunikasi akan tercipta suatu kondisi sosial yang integratif.

Berkaitan dengan implementasi program PNPM Mandiri P2KP sektor informal komunikasi menjadi faktor yang sangat penting. Suatu kebijakan yang telah diputuskan tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat namun harus

dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga kelompok sasaran (target group) mengerti dan memahami maksud dan tujuan kebijaksanaan tersebut. Dalam proses komunikasi inilah petugas/pemandu program akan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan program PNPM Mandiri P2KP, sehingga maksud dan tujuan program PNPM Mandiri P2KP tersebut dapat dimengerti, dipahami kemudian dilaksanakan oleh masyarakat (target group). Hal ini selaras dengan pendapat sarjana T.M. Lilico mengenai kegunaan komunikasi antara lain dapat menyamakan persepsi, mengubah sikap dan perilaku sehingga tercipta kondisi yang integratif.

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara petugas dengan para masyarakat akan memperpendek "jarak pemisah" sehingga mereka akan tampak harmonis dalam hubungan sosialnya. Melalui hubungan sosial itulah petugas dengan mudah akan mengkomunikasikan isi kebijakan/program kepada masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa komunikasi yang dilakukan tersebut akan mempermudah implementasi program-program pemerintah yang salah satunya berwujud peraturan yang ditujukan kepada masyarakat luas (Hedebro, dalam Zulkarimein Nasution: 1989; 56).

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Perret sebagai berikut:

”Fungsi komunikasi antara lain membantu dalam mengatasi sikap dan perilaku negatif dengan membujuk kelompok-kelompok utama pada tingkat yang mungkin menentang program/proyek agar bekerja sama dalam implementasi dan operasinya” (Zulkarimein Nasution, 1989; 136).

Berkaitan dengan komunikasi yang mendukung implementasi program, George C, Edward memberikan pernyataan sebagai berikut:

”Persyaratan utama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, baru kemudian keputusan-keputusan kebijaksanaan tersebut dikomunikasikan dengan masyarakat. Tentu saja, komunikasi yang mendukung implementasi mengandung persyaratan-persyaratan seperti transmisi yang mudah, klaritas (kejelasan) informasi, serta konsistensi” (Budi Winarno, 1989: 156-159).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah diputuskan.

Dalam upaya mengimplementasikan program PNPM Mandiri P2KP, proses komunikasi dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas seperti pertemuan dengan masyarakat, berdialog, melakukan penyuluhan, pemanduan, penyebaran informasi kebijakan dan sebagainya.

2. Pengaruh Sikap Terhadap Implementasi Program PNPM Mandiri P2KP

Pengaruh sikap masyarakat terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP adalah bahwa sikap yang positif dari masyarakat terhadap program PNPM Mandiri P2KP akan berpengaruh terhadap hasil yang baik dan efektif dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh pembuat keputusan (pemerintah).

Kejelasan pengaruh sikap Masyarakat PNPM Mandiri P2KP terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP adalah sebagai berikut: bahwa seringkali dijumpai adanya perbedaan atau pemisah antara perumus program PNPM Mandiri P2KP (pemerintah) dengan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek program PNPM Mandiri P2KP. Kondisi yang demikian membawa implikasi diperlukannya suatu nilai atau sikap yang positif dari pihak pelaksana program (masyarakat). Dengan sikap yang positif inilah maka masyarakat PNPM Mandiri P2KP akan lebih suka melaksanakan program PNPM Mandiri P2KP sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditentukan pemerintah.

Tetapi bila sebaliknya masyarakat mempunyai sikap yang negatif terhadap program PNPM Mandiri P2KP atau

terhadap pemerintah sebagai perumus program maka proses implementasi program PNPM Mandiri P2KP akan lebih rumit karena ada kemungkinan masyarakat enggan melaksanakan program PNPM Mandiri P2KP.

Selanjutnya di bawah ini akan dijabarkan variabel-variabel yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Komunikasi

Sebelum membahas tentang komunikasi sebagai variabel bebas, maka berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian komunikasi dari beberapa ahli komunikasi.

Suhartin Citroboto dalam buku "Prinsip-prinsip dan Teknik Berkomunikasi" mengutip beberapa pengertian komunikasi sebagai berikut:

- a. Oxford Dictionary menyatakan bahwa komunikasi adalah "the sending or exchange of information, idea, ect.
- b. Beni Kaluku mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pengertian dan mengandung semua unsur prosedur yang dapat mempertemukan suatu pemikiran dengan pemikiran lainnya.
- c. Keith Davis mengatakan "communication is the process of passing information and understanding from one person to another"
- d. Phil Astrid Susanto mengatakan, bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambing-lambang yang mengandung arti.

- e. Communicative Skill USA mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang mempunyai tiga unsur yaitu: komunikator, simbol untuk memindahkan arti dan komunikan.

(Suhartin Citrobroto, 1982; 1-3).

Sementara itu, Dann Suganda memberikan arti komunikasi sebagai berikut:

”Komunikasi sebagai proses transfer ide dari pikiran seseorang sebelumnya diterjemahkan dalam bentuk kata-kata atau isyarat-isyarat yang nanti oleh penerimanya diterjemahkan dalam bentuk pikiran, kemudian diberikan jawaban sebagai feedback dari pesan itu”
(Dann Suganda, 1981: 60).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian ide dari seseorang pada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang sehingga dia atau orang lain tersebut mengerti ide yang telah disampaikan oleh orang sebelumnya, sehingga menimbulkan kesamaan ide.

Sedangkan arti penting komunikasi seperti yang diungkapkan oleh TM. Lilico; bahwa tanpa komunikasi maka tidak ada kehidupan sosial yang langgeng dan teratur, kesejahteraan, prestasi dan sebagainya. Setiap sistem sosial apa itu organisasi, lingkungan daerah metropolitan, keluarga dan kesatuan macam lainnya tergantung pada mudah dan pastinya komunikasi. Harus ada penerimaan dan penyampaian gagasan, rencana, perintah, nilai-nilai, perasaan dan tujuan. (TM. Lilico, 1980: 6).

Menurut pendapat di atas maka komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam setiap perubahan kelompok atau organisasi baik besar maupun kecil tidak terkecuali harus adanya kegiatan komunikasi sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mencakup perubahan sikap, perubahan sosial, perubahan pendapat dan perubahan perilaku.

Kembali pada konsep komunikasi di atas, maka dalam penelitian ini komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan sengaja oleh komunikator kepada komunikan untuk merubah sikap, pendapat ataupun perilaku komunikan. Untuk mengetahui dengan jelas dan mendalam, maka komponen-komponen komunikasi tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

3. 1. Komunikator

Yaitu orang atau kelompok yang menyampaikan pesan. Yang dapat bertindak sebagai komunikator dengan demikian dapat berupa perorangan, seperti pejabat pemerintah, pemimpin partai, satuan tugas pelaksana dan sebagainya maupun yang berbentuk kelompok organisasi.

Untuk melaksanakan suatu komunikasi yang baik banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang komponene komunikator. Ditinjau dari komponen komunikator untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, terdapat faktor-faktor penting pada diri komunikator yaitu kepercayaan pada

komunikator (source of attractiveness). Kedua hal ini berdasarkan posisi komunikan yang akan menerima pesan seperti:

- Hasrat seseorang untuk memperoleh suatu pernyataan yang benar. Jadi komunikator mendapat kualitas komunikasinya sesuai dengan kualitas sampai di mana ia memperoleh kepercayaan dari komunikan dan segala sesuatu yang dinyatakannya.
- Hasrat seseorang untuk menyamakan dirinya dengan komunikator atau bentuk hubungan lainnya dengan komunikator yang secara emosional memuaskan. Jadi komunikator akan berhasil dalam komunikasinya apabila ia berhasil memikat perhatian komunikan.

Kepercayaan pada komunikator ditentukan oleh keahlian dan dapat tidaknya ia dipercaya. Kepercayaan yang besar akan meningkatkan perubahan sikap komunikan berkaitan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Kepercayaan pada komunikator mencerminkan bahwa pesan yang diterima komunikan dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan empiris.

Selain itu juga pada umumnya diakui bahwa pesan yang dikomunikasikan mempunyai daya pengaruh yang lebih besar apabila seseorang komunikator dianggap sebagai orang yang ahli, apakah keahliannya itu khas atau bersifat umum seperti yang timbul dari

pendidikan yang lebih baik, status sosial atau jabatan profesi yang lebih tinggi. (Onong Uchyana Effendi, 1981; 39-40).

Komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa pihak komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan. Komunikan menyenangi komunikator apabila ia merasa adanya kesamaan pandangan dalam berbagai hal.

3. 2. Pesan

Dalam komunikasi pesan dapat berupa gejala atau ide, harapan, informasi-informasi tertentu. Seperti halnya dengan komunikator, maka untuk mencapai komunikasi yang efektif perlu diperhatikan hal-hal tertentu. Kondisi yang perlu dipenuhi komunikator agar pesan membangkitkan tanggapan menurut Wilbur Schram sebagai berikut:

- Perencanaan dan penyampaian pesan dapat menarik perhatian komunikan.
- Penggunaan lambang-lambang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga mengerti.
- Pesan dapat membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
- Pesan dapat menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada

pada saat ia digeraikan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Disamping itu dalam komponen pesan terdapat apa yang disebut appeals pesan. Hal ini mengacu pada motif-motif psikologis yang dikandung pesan. Motif-motif psikologis ini dapat berupa tuntutan dan dukungan.

3.3. Media

Media sering diartikan sebagai alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan komunikasi. Dalam komunikasi media yang lazim digunakan terdiri dari:

a. Saluran interpersonal

Saluran ini bersifat langsung saling berhadapan, saling melihat, mengkaji diri komunikan, namun sasrannya tunggal. Bentuknya dapat berupa anjangsana, tukar pikiran dan sebagainya.

b. Saluran kelompok/organisasional

Saluran komunikasi yang ditujukan pada kelompok tertentu. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Misalnya ceramah, diskusi.

c. Media massa

Merupakan saluran komunikasi yang ditujukan massa. Yang dimaksud dengan massa adalah kumpulan orang-orang yang hubungan sosialnya tidak jelas dan tidak terstruktur.

3. 4. Komunikan

Komunikan sering diartikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang menerima pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator. Efektifitas komunikasi apabila ditinjau dari komponen komunikan, seseorang dapat dan akan menerima pesan menurut Chester I. Barnad jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Komunikan dapat dan benar-benar mengerti/memahami pesan komunikasi
- Pada saat mengambil keputusan, komunikan sadar bahwa keputusannya sama dengan tujuannya
- Komunikan mampu untuk menepatinya baik secara mental maupun fisik (Onong Uchyana Effendi, 1981; 45)

Dengan demikian efektivitas komunikasi berkaitan pula dengan pemahaman dan tanggapan komunikan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Komponen efek komunikasi tidak diuraikan dalam bagian ini karena efek tersebut yang akan diteliti, seberapa jauh efektivitas pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media-media tertentu kepada komunikan. Dengan kata lain efek komunikasi dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel dependen.

Bebagai fungsi terdapat dalam komunikasi yang dijalankan komunikator. Diantara fungsi-fungsi itu misalnya sebagai berikut:

- Informasi; pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran pesan yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.
- Sosialisasi; penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya ia aktif dalam masyarakat.
- Motivasi; menjelaskan tujuan setiap masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong/menggerakkan orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu ataupun kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dicapai.
- Perdebatan dan diskusi; menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan mengenai berbagai hal.
- Pendidikan; pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak dan pendidikan berbagai hal yang diperlukan bagi semua bidang kehidupan. (Drs. A. Wijaya, 1986: 15).

Sedangkan tujuan komunikasi adalah mengahrapakan pengertian, dukungan dan gagasan serta tindakan.

Dari uraian mengenai variabel komunikasi di atas maka secara konseptual komunikasi dapat kita definisikan sebagai berikut: "Komunikasi adalah serangkaian kegiatan penyampaian apa yang menjadi pikiran, perasaan, harapan, pengalaman dan pemindahan ide serta penyalinan ide kepada orang lain secara cermat dengan tujuan menimbulkan tindakan ke arah pencapaian tujuan secara efektif".

4. Sikap

Mengacu pada teori pokok implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap (Budi Winarno, 1989; 155). Baik disposisi maupun sikap merupakan proses batin dalam rangka menanggapi suatu obyek. Yang dimaksud dengan disposisi adalah keseluruhan kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu (Drever, 1986: 12).

Berdasarkan pengertian di atas selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan "sikap" (masyarakat PNPM Mandiri P2KP sebagai target group sekaligus pelaksana program paling operasional). Sebagai faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi program PNPM Mandiri P2KP dengan mempertimbangkan bahwa sikap lebih umum diketahui disamping itu sikap lebih dekat dengan perilaku nyata (pre-disposisi tingkah laku).

Sikap adalah kecenderungan untuk melihat kepada sesuatu yang mungkin agak spesifik dengan cara-cara tertentu (Leavitt, 1986: 92).

Sedang menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo yang dimaksud dengan sikap adalah kecenderungan untuk memberikan respon, positif maupun negatif, terhadap orang, benda-benda ataupun situasi-situasi tertentu (Kartini, 1987: 35). Pengertian berikutnya mengenai sikap dikemukakan oleh WJ Thomas yaitu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata dan perbuatan yang mungkin terjadi (Ahmad, 1982: 52).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sikap adalah kecenderungan individu untuk melihat kepada orang, benda-benda ataupun situasi-situasi tertentu dengan memberikan respon, baik positif maupun negatif, yang memberikan kesadaran untuk menentukan perbuatan yang nyata dan mungkin terjadi.

Dengan pengertian sikap tersebut, maka dalam penelitian implementasi program PNPM Mandiri P2KP ini mengambil pengertian sikap masyarakat selaku target group sekaligus pelaksana program paling operasional sebagai keadaan batin yang berisi kecenderungan dari masyarakat program PNPM Mandiri P2KP untuk melihat program PNPM Mandiri P2KP dan memberikan respon, baik positif maupun negatif, yang memberikan kesadaran untuk menentukan perbuatan yang nyata dan perbuatan yang mungkin terjadi.

Sikap terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya (Bachtiar, 1985: 66). Hal serupa dikemukakan oleh Mar'at bahwa sikap merupakan

produk-produk proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh kultur (budaya) dan sering bersifat situasional (Mar'at, 1982: 136-137). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sikap seseorang atau kelompok orang didasarkan pada kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang tersebut.

Kebudayaan menurut Takdir Alisjahbana diartikan sebagai penjelamaan budi manusia yang selalu tersusun dalam suatu pola/konfigurasi nilai-nilai (Bachtiar, 1985: 78). Dia juga menambahkan bahwa sistem budaya terbagi-bagi dalam empat perangkat simbol yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri bagi manusia dalam tindakan antar mereka. Adapun keempat simbol itu adalah: (Bachtiar, 1985: 66)

1. Simbol-simbol konstitutif yang terbentuk sebagai kepercayaan kepercayaan dan biasanya inti dari agama.
2. Simbol-simbol kognitif yang membentuk ilmu pengetahuan.
3. Simbol-simbol penilaian moral yang membentuk nilai-nilai dan aturan-aturan.
4. Simbol-simbol pengungkapan perasaan atau simbol ekspresif.

Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebudayaan akan memunculkan nilai-nilai dan sistem nilai yang akan mempengaruhi sikap.

Sedangkan sistem nilai merupakan bagian dari suatu budaya. Di Indonesia budaya Jawa merupakan budaya yang dominan mempengaruhi sikap dan tingkah laku birokrat. Demikian halnya yang terjadi pada implementasi program PNPM Mandiri P2KP bahwa sikap masyarakat terhadap program PNPM Mandiri P2KP dipengaruhi oleh

sistem nilai yang dianut oleh masyarakat penerima program PNPM Mandiri P2KP.

Agar pembahasan mengenai sikap masyarakat program PNPM Mandiri P2KP terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP mendalam maka perlu diketahui komponen-komponen pembentuk sikap masyarakat.

Menurut Mar'at sikap terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Komponen kognisi yang berhubungan dengan beliefs, ide dan konsep;
2. Komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang;
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Mar'at menambahkan bahwa komponen kognisi akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang apa yang dirasakan terhadap obyek (Mar'at, 1982: 21).

Menurut Mar'at tiga komponen sikap tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi berinteraksi secara kompleks (Mar'at, 1982: 22).

Sikap mempunyai evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi dihubungkan dengan obyek masalah yang disebut "the attitude object" dan akhirnya menghasilkan tingkah laku tertentu (Mar'at, 1982: 13). Oleh sebab itu, agar diperoleh tingkah laku yang positif maka perlu diupayakan dan

diantisipasi hingga diperoleh evaluasi positif dari komponen afeksi dengan cara memberikan pengetahuan yang positif terhadap obyek tingkah laku.

Bila hal tersebut di atas dikaitkan dengan proses implementasi program PNPM Mandiri P2KP jelaslah bahwa, perlu diusahakan timbulnya evaluasi positif dari komponen afeksi sikap masyarakat program PNPM Mandiri P2KP melalui penyuluhan dan pemanduan tentang program PNPM Mandiri P2KP itu sendiri. Dengan demikian dapat diperoleh tingkah laku yang diharapkan dari masyarakat (selaku target grup sekaligus pelaksana program PNPM Mandiri P2KP paling operasional) sehingga pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP akan berhasil dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah (pembuat program).

Sikap masyarakat adalah suatu kecenderungan perilaku yang belum tampak nyata dan bersifat tertutup. Namun demikian dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ciri-ciri sikap dapat diketahui. Dengan mengetahui ciri-ciri dan aspek sikap masyarakat diharapkan dapat diperoleh suatu perilaku atau juga sikap masyarakat yang dikehendaki yaitu mendukung pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP.

Menurut Abu Ahmad bahwa sikap mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Ahmadi, 1982: 53)

1. Sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus dipelajari dalam perkembangan hidupnya. Karena itulah sikap selalu berubah-ubah dan dapat dipelajari.
2. Sikap tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan suatu obyek. Pada umumnya sikap tidak berkenan dengan suatu obyek saja, melainkan juga dapat berkenaan dengan sederetan obyek serupa.
3. Sikap pada umumnya mempunyai segi-segi motivasi dan emosi, sedangkan pada kecakapan dan pengetahuan ini tidak ada.

Dari ciri-ciri sikap di atas dapat diketahui bahwa sikap masyarakat terbentuk sejak masyarakat itu mengenal program PNPM Mandiri P2KP. Sikap masyarakat dapat berubah-ubah sesuai dengan pandangan masyarakat tersebut yaitu atas dasar kognisi, afeksi dan konasi.

Perubahan-perubahan sikap masyarakat terhadap program PNPM Mandiri P2KP itu dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Hoslang, Janis dan Kelly proses perubahan sikap dipengaruhi tiga faktor yaitu perhatian, pengertian dan penerimaan (Mar'at, 1981: 26).

Jadi untuk mewujudkan sikap masyarakat yang positif terhadap program PNPM Mandiri P2KP itu diperlukan perhatian, pengertian dan penerimaan terhadap program PNPM Mandiri P2KP.

Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat sikap masyarakat terhadap program PNPM Mandiri P2KP meliputi:

- a. Faktor-faktor yang menghambat:
 1. Stimulan bersifat indferent, sehingga faktor perhatian kurang berperan terhadap stimulus yang diberikan.
 2. Tidak memberikan harapan masa depan (arti psikologis)

3. Adanya penolakan terhadap stimulus, sehingga tidak ada pengertian terhadap stimulus (menentang).
- b. Faktor-faktor yang menunjang:
1. Dasar utama terjadinya perubahan sikap adalah adanya imbalan hukuman, dimana individu mengasosiasikan reaksi dengan imbalan dan hukuman.
 2. Stimulus mengandung harapan bagi individu sehingga dapat terjadi perubahan sikap.
 3. Stimulus mengandung prasangka bagi individu yang mengubah sikap semula.

Menurut teori stimulus-respon, teori yang menitikberatkan pada penyebab sikap yang dapat mengubahnya tergantung pada kualitas rangsangan berorganisasi dengan sumbernya, bahwa pemberian informasi sangat penting untuk dapat memberi pengertian, perhatian dan penerimaan terhadap obyek sikap. Pemberian informasi tersebut pada dasarnya dapat mengubah komponen kognisi. Selain itu, dalam teori stimulus respon juga diutamakan pemberian imbalan yang efektif agar komponen kognisi dapat diarahkan pada sasaran yang dikehendaki (Mar'at, 1981: 26).

Demikian pula halnya dengan yang diharapkan dalam implementasi program PNPM Mandiri P2KP bahwa pemberian informasi mengenai program PNPM Mandiri P2KP akan memberikan

pengertian, perhatian dan penerimaan masyarakat terhadap program PNPM Mandiri P2KP.

Dalam implementasi program PNPM Mandiri P2KP secara baik diperlukan adanya sikap yang mendukung dari masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pelaksanaan program paling operasional. Menurut Edward, pembentukan sikap masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (Edward, 1980: 90)

1. Tingkat ketepatan pemilihan staf pelaksana.
2. Tingkat kepercayaan pelaksana terhadap manfaat yang dapat diambil dari pelaksana program.
3. Tingkat harapan-harapan pelaksana.
4. Tingkat penilaian pelaksana terhadap imbalan.
5. Penilaian pelaksana terhadap tanggung jawab pelaksana.
6. Tingkat penolakan pelaksana.
7. Tingkat ketergantungan program intern atas program baru.
8. Tingkat perbedaan pandangan antar pelaksana dengan perumus program.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap masyarakat maka diharapkan dapat sejauh mungkin meningkatkan sikap yang mendukung sehingga implementasi program PNPM Mandiri P2KP dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Dari pemaparan variabel sikap di atas, maka secara konseptual sikap dalam penelitian ini dapat kita definisikan sebagai berikut: "Sikap adalah keadaan yang berisi kecenderungan untuk melihat program PNPM Mandiri P2KP dan memberikan respon, baik positif maupun negatif yang memberikan kesadaran untuk menentukan perbuatan yang nyata dan perbuatan yang mungkin terjadi".

5. Implementasi Program PNPM Mandiri P2KP

Mempelajari implementasi kebijakan publik pada hakekatnya berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan diformulasikan dan mendapatkan pengesahan. Implementasi khususnya berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijaksanaan, mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijaksanaan tersebut pada masyarakat.

Menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab secara pendek bahwa to implement means to provide the means for carrying out, to give practical effect to (menediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak terhadap sesuatu) (Solichin Abdul Wahab, 1990; 50).

Bila pandangan tersebut diikuti maka implementasi kebijaksanaan berarti sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah diputuskan.

James E. Anderson mengemukakan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 1986: 17).

Sedangkan menurut Carl J. Frederick mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Islamy, 1986: 17).

Kebijakan menurut PBB adalah merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas atau rencana (Wahab, 1990: 12).

Berdasarkan definisi-definisi di muka maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang bersifat konseptual mengenai serangkaian tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan maka disusunlah suatu program, seperti apa yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab sebagai berikut:

Sebagai pernyataan kehendak dari pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu atau mengenai medan umum yang diharapkan dicapai dalam waktu tertentu, maka kebijakan dalam pengertian ini tentu belum bersifat operasional (Wahab, 1990: 15).

Kemudian ia menambahkan:

Demikian pula halnya kita berbicara tentang kebijakan pemerintah..... maka ia terdiri dari sejumlah program tertentu. Program-program biasanya dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai kebijakan (tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah). (Wahab, 1990b: 18).

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa program merupakan operasionalisasi dari kebijakan. Jadi dalam hal ini program dapat diartikan sebagai suatu kebijakan.

Menurut Terry program diartikan sebagai rencana yang komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk suatu pola yang terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan tindakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran (Terry, 1986: 288).

Program menurut Solichin Abdul Wahab diartikan sebagai suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legisasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan (Wahab, 1990: 17).

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo yang dimaksud dengan program adalah suatu bentuk aktivitas organisasi sosial dengan sasaran, ruang, waktu, terbatas (Tjokroamidjojo, 1987: 180).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan program adalah suatu aktivitas organisasi/pemerintah yang meliputi pengesahan, pengorganisasian, pengerahan sumber-sumber daya dalam rangka mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini pengertian program yang dimaksud adalah program PNPM Mandiri P2KP.

Yang dimaksud program PNPM Mandiri P2KP adalah suatu bentuk pelaksanaan program usaha mandiri yang menggunakan model yang berorientasi pada kelompok kerja yang diharapkan akan dapat mempercepat tercapainya proses alih peran perluasan kesempatan kerja untuk berusaha sendiri dengan usaha-usaha yang telah ada di lingkungan setempat dari pemerintah kepada masyarakat.

Atau dengan kata lain program PNPM Mandiri P2KP adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membimbing usaha kecil, usaha keluarga dan tenaga kerja terampil di daerah pedesaan maupun perkotaan di bidang jasa produksi rumah tangga dan kerajinan rakyat yang dirahkan untuk meningkatkan ketrampilan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan mutu produk yang dihasilkan, menjadi gerakan masyarakat.

Agar program PNPM Mandiri P2KP dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka program PNPM Mandiri P2KP harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Tjokroamidjojo, 1987: 181)

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk atau mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam suatu usaha pembangunan dan program pembangunan.
6. Berbagai usaha di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Selanjutnya setelah program PNPM Mandiri P2KP dirumuskan/diformulasikan dengan baik maka perlu diimplementasikan agar tujuan program PNPM Mandiri P2KP dapat tercapai. Tanpa pelaksanaan maka program PNPM Mandiri P2KP hanya akan berupa rumusan yang tercetak dan tersimpan dalam arsip.

Implementasi program merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu serta kelompok anggota masyarakat yang diarahkan pada usaha mewujudkan sasaran keputusan kebijakan yang telah diambil (Wahab, 1990b: 51).

Menurut Edward implementasi kebijakan adalah arena pembuatan kebijakan antara penegakan sebagai penerimaan aturan-aturan dan

konsekuensi dari kebijakan orang-orang yang terpengaruh kebijakan tersebut (Edward, 1980: 1).

Sedangkan menurut Hoogerwerf yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah penggunaan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang dipilih (Hoogerwerf, 1983: 157).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi program PNPM Mandiri P2KP adalah penegakan dan pelaksanaan keputusan atau ketentuan program PNPM Mandiri P2KP yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang diarahkan pada usaha pencapaian tujuan program PNPM Mandiri P2KP.

Selanjutnya agar program PNPM Mandiri P2KP dapat terimplentasi dengan baik dan sempurna maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut dikemukakan oleh Hoowodan Gun sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber daya yang memadai.
3. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna.

Disamping syarat-syarat yang diperlukan untuk pengimplementasian program secara sempurna, maka dapat juga dilihat apakah program PNPM Mandiri P2KP yang diimplemntasikan telah memenuhi tahap-tahap implementasi yang diharapkan.

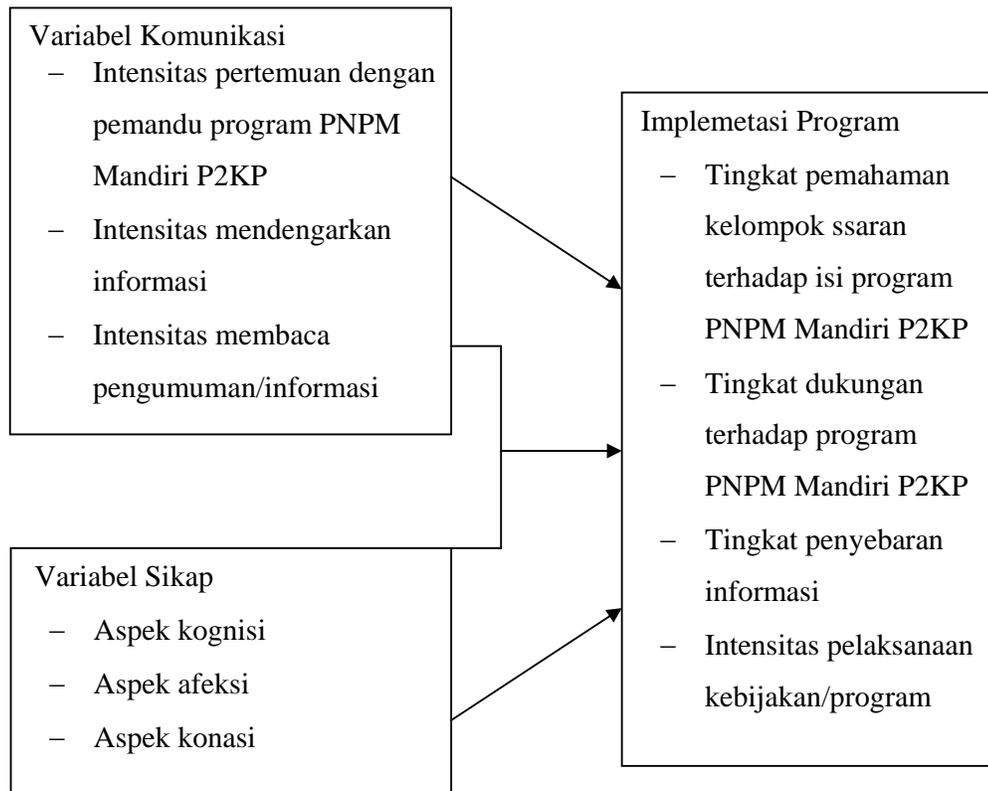
Menurut Daniel Mazmania et.al., suatu program yang dilaksanakan dapat dilihat dari tahap-tahap pelaksanaan (variabel tergantung) yang terdiri atas output kebijakan/program badan-badan pelaksana, kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan/program, dampak output kebijakan/program sebagai dipersepsi, perbaikan mendasar dalam undang-undang (Wahab, 1990; 68).

Selain itu suatu kebijaksanaan dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila isi dari program tersebut dapat dijalankan dengan optimal oleh kelompok sasaran. Untuk memudahkan pengukuran terhadap variabel implementasi kebijakan ini, paling tidak pendapat J. A. M. Mears berikut ini dapat dijadikan acuan dalam membuat operasionalisasi variabel implementasi kebijakan/program sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan/program.
2. Tingkat dukungan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan/program.
3. Tingkat kejelasan yang diberikan oleh kelompok sasaran selama pelaksanaan kebijakan/program.
4. Intensitas pelaksanaan kebijakan/program.

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah diketahui bahwa implementasi kebijakan/program memiliki tolok ukur sehingga dalam penelitian ini parameter implementasi kebijakan tersebut akan dijadikan acuan dalam membuat definisi operasional yang dikaitkan dengan tujuan program PNPM Mandiri P2KP. Sedangkan definisi konseptual implementasi program PNPM Mandiri P2KP adalah sebagai berikut: "Implementasi program PNPM Mandiri P2KP adalah tindakan pelaksanaan/penegakan ketentuan program PNPM Mandiri P2KP yang dilakukan kelompok kerja dan masyarakat yang diarahkan pada tercapainya program PNPM Mandiri P2KP.

Setelah penguraian mengenai teori yang mendasari penelitian tentang pengaruh komunikasi dan sikap terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP di kabupaten pati, tersebut di atas untuk lebih jelasnya di bawah ini akan di jelaskan secara geometrikan mengenai hubungan antar variabel sebagai berikut:



Dengan melihat hubungan antar variabel yang digambarkan secara geometrikal, maka dari sini dapat diterangkan bahwa komunikasi dapat mempengaruhi implementasi program. Berhasil tidaknya proses komunikasi dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: Intensitas pertemuan dengan pemandu program PNPM Mandiri P2KP, intensitas mendengarkan informasi, intensitas membaca pengumuman/informasi. Keberhasilan komunikasi akan sangat mempengaruhi implementasi program PNPM Mandiri P2KP, karena dengan berhasilnya komunikasi maka target group akan mengetahui isi, maksud dan tujuan dari suatu program.

Setelah target group mengetahui isi, maksud dan tujuan suatu program maka target group diharapkan akan memahami kemudian melaksanakan suatu program sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembuat program. Sebaliknya bila komunikasi dinilai kurang berhasil maka target group pun tidak akan mungkin melaksanakan program dengan baik, karena bukan tidak mungkin mereka tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui mengenai isi, maksud dan tujuan dari suatu program.

Demikian juga halnya dengan sikap dalam mempengaruhi implementasi program PNPM Mandiri P2KP. Sikap yang positif dari masyarakat terhadap program PNPM Mandiri P2KP akan berpengaruh terhadap hasil yang baik dan efektif dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh pembuat keputusan. Sebaliknya dengan sikap yang negatif akan menghambat pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP. Sikap positif dan negatif ini diketahui dengan menggunakan indikator: aspek kognisi, aspek afeksi dan aspek konasi.

Kemudian secara bersama-sama antara komunikasi dan sikap akan mempengaruhi pelaksanaan program PNPM Mandiri P2KP. Sedang berjalan tidaknya program PNPM Mandiri P2KP dalam penelitian ini diukur dengan indikator sebagai berikut: tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap isi program PNPM Mandiri

P2KP, tingkat dukungan terhadap program PNPM Mandiri P2KP dan tingkat penyebaran informasi.

D. DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam suatu penelitian perlu dibatasi/ditegaskan pengertian dan konsep-konsep yang digunakan sehingga dapat diperoleh kepastian dan ruang lingkup penelitian.

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program PNPM Mandiri P2KP adalah tindakan pelaksanaan/penegakan ketentuan program PNPM Mandiri P2KP yang dilakukan oleh pengurus kelompok kerja dan masyarakat penerima program PNPM Mandiri P2KP yang diarahkan pada tercapainya program PNPM Mandiri P2KP.
2. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian apa yang menjadi pikiran, perasaan, harapan, pengalaman dan pemindahan ide serta penyalinan ide kepada orang lain secara cermat dengan tujuan menimbulkan tindakan ke arah pencapaian tujuan secara efektif.
3. Sikap adalah keadaan yang berisi kecenderungan untuk melihat program PNPM Mandiri P2KP dan memberikan respon, baik positif maupun negatif yang memberikan kesadaran untuk menentukan perbuatan yang nyata dan perbuatan yang mungkin terjadi.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Setelah variabel-variabel penelitian dikonseptualisasikan maka langkah berikutnya adalah pengoperasionalan ke dalam indikator-indikator beserta pengukurannya yang mampu menggambarkan dan mewakili gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya.

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Komunikasi

Indikator-indikator:

- a. Intensitas pertemuan dengan pemandu program PNPM Mandiri P2KP
 - Intensitas kunjungan pemandu
 - Intensitas berdialog
 - Intensitas aktif dalam dialog dengan pemandu
 - Intensitas mengajukan usul, saran dan sebagainya
- b. Intensitas mendengarkan informasi
 - Intensitas pemandu memberikan penyuluhan
 - Tingkat pemahaman terhadap informasi yang diberikan
 - Intensitas memperoleh informasi dari pemandu
 - Intensitas berkonsultasi dengan pemandu
 - Tingkat kepedulian terhadap informasi yang diterima
- c. Intensitas membaca pengumuman/informasi
 - Intensitas menyebarkan informasi

- Intensitas masyarakat menerima informasi

2. Variabel Sikap

Indikator-indikator:

a. Aspek kognisi, yaitu suatu kepercayaan yang evaluatif dari

masyarakat program PNPM Mandiri P2KP terhadap program PNPM Mandiri P2KP yang meliputi penilaian baik atau buruk, diterima atau tidak, menguntungkan atau tidak.

- Tingkat kepercayaan terhadap program PNPM Mandiri P2KP
- Tingkat kepercayaan terhadap tujuan program PNPM Mandiri P2KP
- Tingkat kepercayaan terhadap manfaat program PNPM Mandiri P2KP

b. Aspek afeksi, yaitu suatu kaitan emosional (yang dirasakan)

oleh masyarakat program PNPM Mandiri P2KP berkaitan dengan program PNPM Mandiri P2KP

- Tingkat persetujuan terhadap program PNPM Mandiri P2KP
- Tingkat persetujuan terhadap cara pencapaian tujuan program PNPM Mandiri P2KP
- Tingkat persetujuan terhadap cara merasakan manfaat program PNPM Mandiri P2KP

c. Aspek konasi, yaitu mencakup kesiapan-kesiapan

masyarakat untuk bertindak laku dalam mendukung dan membantu program PNPM Mandiri P2KP

- Tingkat kemampuan bertindak menjalankan program PNPM Mandiri P2KP
 - Tingkat kesiapan untuk bertindak menjalankan program PNPM Mandiri P2KP
 - Tingkat kesediaan bertindak sebagai pelaksana program PNPM Mandiri P2KP
3. Variabel implementasi program PNPM Mandiri P2KP
- Indikator-indikator:
- a. Tingkat pemahaman kelompok sasaran terhadap isi program PNPM Mandiri P2KP
 - Tingkat kesetujuan dengan program
 - Tingkat motivasi untuk berusaha mandiri
 - Tingkat kemampuan wawasan usaha mandiri
 - Tingkat usaha untuk mengenal usaha mandiri
 - Tingkat kepedulian terhadap lingkungan usaha
 - b. Tingkat dukungan terhadap program PNPM Mandiri P2KP
 - Tingkat dukungan terhadap program PNPM Mandiri P2KP
 - Tingkat mengatur administrasi usaha mandiri
 - Tingkat kesediaan mengembangkan usaha mandiri
 - c. Tingkat penyebaran informasi
 - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi program

- Tingkat partisipasi masyarakat program PNPM Mandiri P2KP dalam menyebarkan informasi mengenai usaha mandiri kepada keluarga lain.

F. HIPOTESA

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut:

1. Hipotesa Mayor:

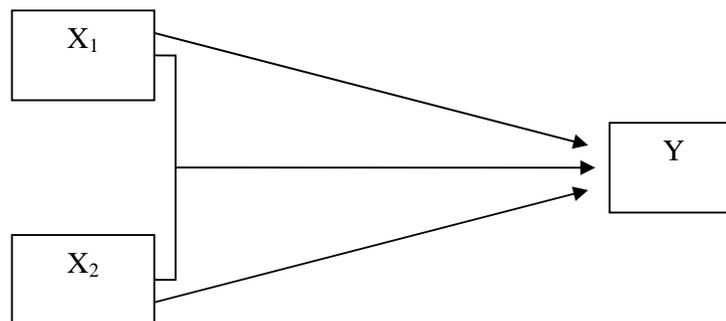
- Ada hubungan positif antara komunikasi dan sikap dengan implementasi program PNPM Mandiri P2KP.

2. Hipotesa Minor:

- Ada hubungan positif antara komunikasi dengan implementasi program PNPM Mandiri P2KP
- Ada hubungan positif antara sikap dengan implementasi program PNPM Mandiri P2KP

3. Hubungan Antar Variabel (Model Geometrika)

Hubungan antara variabel komunikasi dan variabel sikap dengan variabel implementasi program PNPM Mandiri P2KP secara geometrik digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

X₁: Komunikasi

X₂: Sikap

Y : Implementasi Program PNPM Mandiri

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk dengan sengaja menangkap gejala-gejala alam ataupun masyarakat, berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru di belakang gejala tadi. Tujuan pokok dari penelitian sosial adalah menerangkan fenomena-fenomena sosial dengan menghubungkan dengan yang lainnya. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah:

a. Tujuan teoritis:

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penyuluhan dan pemanduan PNPM Mandiri P2KP.

Disamping untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis dalam studi implementasi kebijakan.

Tujuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP.

2. Mengetahui pengaruh sikap terhadap implementasi program PNPM Mandiri
3. Mengetahui pengaruh komunikasi dan sikap terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP.

b. Tujuan Praktis:

Tujuan praktis penelitian ini adalah:

1. Mencoba memberikan masukan berupa pemikiran kepada badan/organisasi pembina program PNPM Mandiri P2KP, khususnya dalam rangka peningkatan keberhasilan implementasi program PNPM Mandiri.
2. Mencoba mengkonfirmasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
3. Memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kegunaan penelitian tentang pengaruh komunikasi dan sikap terhadap implementasi program PNPM Mandiri P2KP adalah:

- a. Bagi praktisi, dalam hal ini Tim Koordinasi Program PNPM Mandir P2KP dalam rangka perumusan dan perbaikan serta pengembangan program di bidang ketenagakerjaan, khususnya program PNPM Mandiri P2KP.

- b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam pengetahuan tentang kebijakan publik sebagai bekal pengetahuan diri.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dapat digolongkan ke dalam penelitian penjelasan (explanatory) atau disebut juga dengan penelitian uji hipotesa (testing research). Dapat digolongkan demikian karena penelitian ini menyoroti hubungan antara variabel-variabel dan sekaligus menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya (Masri; 1986; 3).

3. Jenis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua jenis data, yakni:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban-jawaban responden (resipien program PNPM Mandiri P2KP) atas pertanyaan-pertanyaan dalam daftar pertanyaan/kuesioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikutip dari sumber lain seperti laporan-laporan, dokumen, literatur dan data-data statistik serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview Guide

Yaitu sejumlah pertanyaan yang ditujukan pada daerah tempat penelitian.

b. Daftar Pertanyaan atau Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan didasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup maupun terbuka. Bersifat tertutup artinya responden hanya menjawab pertanyaan dengan memilih alternatif jawaban yang tersedia. Sedangkan bersifat terbuka berarti responden boleh menjawab seperti keinginan responden.

c. Wawancara Terbimbing (directed interview)

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung secara terstruktur dengan pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh/dikumpulkan.

d. Studi Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok bahasa

5. Skala Pengukuran

Bedasarkan karakteristik variabel penelitian yaitu komunikasi dan sikap serta implemntasi program, maka skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Setiap variabel dapat diukur dengan penjabaran dalam rentang skala seperti uraian berikut ini:

- a. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala pengukuran antara rentang skor 1 sampai 4, skor ini bersifat membedakan dan mengurutkan tetapi tidak memberikan jarak, yang bobotnya ditentukan berdasarkan bobot jawaban pertanyaan.
- b. Untuk pertanyaan yang hanya menyediakan dua pilihan jawaban: "ya" atau "tidak", "pernah" atau "tidak pernah" atau sejenisnya, maka hanya dua simbol jawaban yang tidak digunakan yaitu A dan B. Pada item jenis ini tidak dilakukan penskoran melainkan hanya bersifat filter bagi pertanyaan yang lain.
- c. Pada pertanyaan yang berbentuk terbuka dan bersifat tidak berstruktur ditemukan variasi jawaban responden. Berdasarkan pada kenyataan ini, maka jawaban tersebut hanya digunakan untuk melengkapi informasi dari data atau pertanyaan tertutup.

6. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari obyek penelitian yang kriterianya telah ditentukan. Populasi dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu populasi penelitian dan populasi sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok kerja program PNPM Mandiri P2KP yang ada di Kelurahan Pati Kidul

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang diambil dengan maksud untuk mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel melalui pembatasan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Hadari, 1985; 157). Responden yang dipilih adalah masyarakat yang ikut dalam program P2KP PNPM Mandiri Kelurahan Pati Kidul dan dipilih secara acak. Menurut Roscoe sampel yang bisa mewakili populasi sebaiknya diambil lebih dari 30 dan kurang dari 500 serta jika sampel dibagi dalam sub sampel maka setiap kategori diperlukan minimum 30 sampel. Maka jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 40 sampel.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu kegiatan mengoreksi atau meneliti kembali keseluruhan data yang diperoleh, untuk mengetahui lengkap tidaknya pengisian, keterbacaan tulisan dan relevansi jawaban.

b. Koding

Yaitu pengklasifikasian jawaban responden menurut macam atau jenisnya dengan tanda/kode tertentu.

c. Tabulasi

Yaitu proses penyusunan data kembali dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini jawaban serupa dikelompokkan dengan teliti dan teratur kemudian dihitung/dijumlahkan berapa banyak peristiwa/gejala yang termasuk dalam satu kategori. Kegiatan ini dilakukan sampai terwujudnya tabel yang berguna dalam analisa data.

8. Analisa Data dan Pengujian Hipotesa

Ada dua macam analisa data yang dilakukan yaitu:

a. Analisa Kualitatif

Yaitu analisa pengolahan data dalam uraian atau gambaran tentang gejala/fenomena yang diteliti. Penggunaan analisis ini dalam

rangka penggambaran ataupun penjelasan pengaruh antara komunikasi, sikap dan implementasi program.

b. Analisa Kuantitatif

Yaitu analisis data yang berbentuk angka. Biasanya analisis ini digunakan apabila data yang dikumpulkan besar dan mudah diklasifikasikan dalam kategori-kategori.

Dengan dasar data yang diperoleh, dimana pengukurannya menggunakan skala ordinal, maka rumus statistik yang digunakan sebagai berikut:

1. Koefisien Korelasi Rank Kendall: (Siegel, 1985: 271)

Rumus ini digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara satu variabel berpengaruh (X) dengan satu variabel terpengaruh (Y), adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$R = \frac{1 - 6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

N = Jumlah responden yang diranking

d = Jumlah selisih antara ranking pada variabel tergantung yang telah diurutkan

Selanjutnya untuk menguji signifikansinya, digunakan rumus sebagai berikut: (Siegel, 1985: 273)

$$Z = \frac{\Sigma R}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(n-1)}}}$$

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

- Jika Z dihitung $> Z_{t1\%}$, sangat signifikan, ha diterima
- Jika Z dihitung $> Z_{t5\%}$, signifikan, ha diterima
- Jika Z dihitung $> Z_{t5\%}$, tidak signifikan, ha ditolak.

2. Koefisien Konkordasi Kendall: (Siegel, 1985: 289)

Digunakan untuk menghitung atau mengukur tingkat korelasi antara variabel komunikasi (X_1) dan sikap (Y_2) dengan implementasi program PNPM Mandiri P2KP (Y).

$$R_{X_1 \cdot X_2 \cdot Y} = \sqrt{\frac{R_{X_1^2 Y} + 2R_{X_1 Y} \cdot R_{X_2 Y} + R_{X_1 X_2}}{1 - (R_{X_1 X_2})^2}}$$

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikannya menggunakan rumus Chi-Square: (Siegel, 1985: 292)

$$X^2 = k(N-1) \cdot R_{X_1 X_2 Y}$$

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis

- Jika χ^2 hitung $> Z_{t1\%}$, sangat signifikan

- Jika χ^2 hitung $> Z_{t5\%}$, signifikan
- Jika χ^2 hitung $> Z_{t1\%}$, tidak signifikan.